



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9561-9567

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Pengawasan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun terhadap Bongkar Muat Barang di Pelabuhan

Wulan Syahfina¹, Tri Mardalena², Nisha Desfi Arianti³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Karimun

¹wsyahfina@gmail.com, ²mardalena.tri@gmail.com, ³nishadesfia67@gmail.com

Abstrak

Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan domestik merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi antardaerah. Namun demikian, pergerakan barang antarpulau juga berpotensi membawa risiko kesehatan masyarakat apabila tidak disertai dengan pengawasan kekarantinaan kesehatan yang memadai. Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Tanjung Balai Karimun memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap barang, alat angkut, dan lingkungan pelabuhan guna mencegah masuk dan keluarnya penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan bongkar muat barang yang dilaksanakan oleh BKK Kelas I Tanjung Balai Karimun, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya penguatan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan bongkar muat barang telah dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, pemeriksaan fisik terhadap barang tertentu yang berisiko, serta pemantauan sanitasi lingkungan pelabuhan. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, tingginya intensitas aktivitas bongkar muat pada waktu tertentu, keterbatasan fasilitas pendukung, serta rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya pengawasan kekarantinaan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas dan jumlah petugas, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, serta peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan domestik.

Kata kunci: Pengawasan, Kekarantinaan Kesehatan, Bongkar Muat Barang, Pelabuhan Domestik, Tanjung Balai Karimun

1. Latar Belakang

Pelabuhan domestik merupakan simpul penting dalam sistem transportasi laut nasional yang berperan sebagai penghubung distribusi barang antarpulau. Keberadaan pelabuhan tidak hanya mendukung kelancaran arus logistik dan aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap aspek kesehatan masyarakat. Tingginya mobilitas barang melalui pelabuhan berpotensi menjadi media perpindahan berbagai faktor risiko kesehatan, seperti agen penyakit, vektor, maupun kontaminan lingkungan, apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai.

Aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan domestik memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai jenis barang, volume muatan yang besar, serta interaksi banyak pihak. Barang yang berasal dari berbagai daerah dapat membawa risiko kesehatan, terutama apabila berupa bahan pangan segar, hasil perikanan, atau barang mudah rusak. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kelancaran operasional, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pengawasan bongkar muat barang merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap masuk dan keluarnya penyakit melalui jalur transportasi laut. Pengawasan ini menjadi semakin penting mengingat pelabuhan merupakan titik temu antara wilayah asal dan wilayah tujuan distribusi barang. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, potensi penyebaran penyakit dapat meluas ke wilayah lain dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kekarantinaan kesehatan terhadap orang, alat angkut, barang,

serta lingkungan di wilayah pelabuhan. Peran BKK tidak hanya terbatas pada pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik barang, pemantauan sanitasi lingkungan, serta koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan bahwa aktivitas pelabuhan berlangsung sesuai dengan ketentuan kekarantinaan kesehatan.

Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu jalur distribusi barang antarpulau di Provinsi Kepulauan Riau. Tingginya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan ini mencerminkan perannya yang penting dalam mendukung perekonomian daerah. Namun demikian, kondisi tersebut juga meningkatkan potensi risiko kesehatan masyarakat apabila pengawasan bongkar muat barang tidak dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengawasan kesehatan di pelabuhan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan kapal dan penumpang. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti implementasi pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan domestik masih relatif terbatas. Padahal, pergerakan barang memiliki potensi risiko kesehatan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pergerakan orang dan alat angkut.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi pengawasan bongkar muat barang oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan, khususnya di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana pengawasan bongkar muat barang dilaksanakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya penguatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan domestik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi pengawasan bongkar muat barang oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Tanjung Balai Karimun. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, mekanisme, serta dinamika pengawasan yang berlangsung di lapangan, termasuk kendala dan upaya penguatan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Penelitian dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan jangka waktu kurang lebih dua bulan, yaitu dari 29 September 2025 hingga 21 November 2025. Lokasi penelitian bertempat di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Tanjung Balai Karimun yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta (Poros), Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan domestik tersebut serta peran strategis BKK dalam pengawasan kekarantinaan kesehatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung selama kegiatan PKL. Wawancara dilakukan dengan koordinator dan staf BKK yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang. Wawancara bersifat terstruktur dan semiterstruktur untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengawasan, mekanisme kerja, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif terhadap aktivitas kerja harian, khususnya kegiatan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, serta pemantauan sanitasi lingkungan pelabuhan.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan instansi, arsip administrasi, standar operasional prosedur (SOP), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lainnya yang mendukung kajian teoritis penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari narasumber, observasi digunakan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung dan penguat temuan penelitian. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan

menginterpretasikan temuan penelitian untuk menggambarkan implementasi pengawasan bongkar muat barang, kendala yang dihadapi, serta upaya penguatan yang dapat dilakukan oleh BKK Kelas I Tanjung Balai Karimun.

3. Hasil dan Diskusi

Konteks Pengawasan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Domestik

Pelabuhan domestik merupakan simpul utama dalam sistem transportasi laut nasional yang berfungsi sebagai penghubung distribusi barang antarpulau. Keberadaan pelabuhan tidak hanya berperan dalam mendukung kelancaran arus logistik dan pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap aspek kesehatan masyarakat. Intensitas aktivitas bongkar muat yang tinggi menjadikan pelabuhan sebagai titik rawan terhadap masuk dan keluarnya berbagai faktor risiko kesehatan, baik berupa agen penyakit, vektor, maupun kontaminan lingkungan yang terbawa bersama pergerakan barang.

Dalam perspektif kesehatan masyarakat, pengawasan bongkar muat barang merupakan instrumen preventif yang sangat penting. Barang yang berasal dari berbagai daerah memiliki potensi membawa bibit penyakit atau menjadi media perkembangbiakan vektor apabila tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan tidak dapat dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari sistem perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) sebagai institusi teknis memiliki mandat strategis untuk memastikan bahwa setiap pergerakan barang melalui pelabuhan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pelabuhan maupun daerah tujuan distribusi.

Di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, posisi geografis yang strategis sebagai jalur distribusi antarpulau di Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan tingginya frekuensi bongkar muat barang. Aktivitas ini berlangsung hampir setiap hari dengan volume dan jenis barang yang beragam. Kondisi tersebut menuntut pelaksanaan pengawasan yang konsisten, sistematis, dan berbasis risiko. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan administratif, tetapi juga diarahkan pada upaya mitigasi risiko kesehatan jangka panjang guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan masyarakat akibat aktivitas pelabuhan.

Pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan domestik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep pencegahan dalam kesehatan masyarakat. Pelabuhan sebagai titik masuk dan keluar barang memiliki potensi menjadi media penyebaran penyakit lintas wilayah apabila tidak disertai dengan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, pengawasan bongkar muat barang harus dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dalam konteks Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, tingginya intensitas bongkar muat barang memperkuat urgensi pengawasan yang konsisten dan berbasis risiko. Pengawasan yang efektif tidak hanya berkontribusi pada perlindungan kesehatan masyarakat pelabuhan, tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di wilayah tujuan distribusi barang. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bongkar muat barang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem kesehatan masyarakat secara lebih luas.

Pemeriksaan Dokumen Administrasi sebagai Instrumen Pengendalian Risiko

Pemeriksaan dokumen administrasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang. Dokumen seperti manifes barang, surat keterangan asal barang, serta dokumen pendukung lainnya menjadi sumber informasi utama bagi petugas dalam melakukan identifikasi awal terhadap potensi risiko kesehatan. Melalui dokumen tersebut, petugas dapat mengetahui jenis barang, asal daerah, volume muatan, serta tujuan distribusi barang.

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dokumen di BKK Kelas I Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai alat skrining awal untuk menentukan apakah suatu barang memerlukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Barang dengan dokumen yang lengkap dan jelas umumnya dinilai memiliki risiko lebih rendah, sedangkan ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen dapat mengindikasikan adanya potensi pelanggaran atau risiko kesehatan tertentu.

Ketelitian petugas dalam memeriksa dokumen sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Kesalahan atau kelalaian pada tahap pemeriksaan dokumen dapat berdampak pada terlewatnya potensi risiko kesehatan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal. Oleh karena itu, pemeriksaan dokumen tidak hanya membutuhkan ketelitian, tetapi juga pemahaman petugas terhadap karakteristik barang dan regulasi yang berlaku.

Pemeriksaan dokumen administrasi tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan formal, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian risiko kesehatan yang bersifat preventif. Ketepatan dan kelengkapan dokumen

memungkinkan petugas untuk melakukan penilaian awal terhadap potensi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh suatu barang. Dengan demikian, pemeriksaan dokumen menjadi fondasi penting dalam sistem pengawasan bongkar muat barang secara keseluruhan.

Selain itu, pemeriksaan dokumen juga berperan dalam menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Kepatuhan administratif yang baik secara tidak langsung mencerminkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pemeriksaan dokumen perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan domestik.

Pemeriksaan Fisik Barang Berisiko Tinggi

Selain pemeriksaan dokumen administrasi, BKK juga melaksanakan pemeriksaan fisik terhadap barang-barang tertentu yang dinilai memiliki risiko kesehatan lebih tinggi. Barang-barang tersebut antara lain bahan pangan segar, hasil perikanan, dan barang mudah rusak yang berpotensi mengalami penurunan kualitas atau kontaminasi selama proses distribusi. Pemeriksaan fisik difokuskan pada kondisi kemasan, kebersihan, serta kemungkinan adanya kontaminasi biologis maupun kimia yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemeriksaan fisik dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini diterapkan mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia, sehingga tidak semua barang dapat diperiksa secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, petugas memprioritaskan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dinilai memiliki potensi risiko paling besar.

Meskipun pendekatan berbasis risiko dinilai cukup efektif dalam kondisi keterbatasan, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Tidak semua potensi risiko dapat teridentifikasi apabila pemeriksaan fisik hanya dilakukan secara selektif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sumber daya dan fasilitas yang memadai agar pemeriksaan fisik dapat dilakukan secara lebih optimal dan menyeluruh.

Pemeriksaan fisik barang berisiko tinggi menjadi langkah lanjutan yang sangat penting setelah proses pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan ini memungkinkan petugas untuk memastikan kesesuaian antara kondisi fisik barang dengan informasi yang tercantum dalam dokumen. Ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi fisik barang dapat menjadi indikator adanya potensi risiko kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu menuntut penerapan pendekatan berbasis risiko dalam pemeriksaan fisik barang. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meskipun masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas petugas dan penyediaan sarana pendukung menjadi faktor penting untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pemeriksaan fisik barang di pelabuhan domestik.

Pemantauan Sanitasi Lingkungan Pelabuhan

Pengawasan bongkar muat barang tidak dapat dipisahkan dari kondisi sanitasi lingkungan pelabuhan. Lingkungan pelabuhan yang tidak terjaga kebersihannya berpotensi menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti tikus, serangga, dan organisme lainnya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, BKK Kelas I Tanjung Balai Karimun secara rutin melakukan pemantauan sanitasi di area bongkar muat.

Pemantauan sanitasi mencakup kebersihan area kerja, pengelolaan limbah, serta kondisi fasilitas pendukung di sekitar pelabuhan. Berdasarkan hasil penelitian, pemantauan sanitasi telah dilakukan secara berkala, namun belum sepenuhnya optimal pada saat aktivitas bongkar muat berlangsung dengan intensitas tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan sanitasi memerlukan dukungan yang lebih kuat, terutama melalui koordinasi dengan pengelola pelabuhan dan pihak terkait lainnya.

Kondisi sanitasi lingkungan pelabuhan yang terjaga dengan baik akan mendukung efektivitas pengawasan bongkar muat barang secara keseluruhan. Lingkungan kerja yang bersih dan tertata tidak hanya mengurangi risiko berkembangnya vektor penyakit, tetapi juga menciptakan kondisi kerja yang lebih aman bagi petugas dan pekerja pelabuhan. Oleh karena itu, pemantauan sanitasi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pengawasan kekarantinaan kesehatan.

Peningkatan koordinasi antara BKK dan pengelola pelabuhan menjadi kunci dalam menjaga sanitasi lingkungan, terutama pada saat aktivitas bongkar muat berlangsung dengan intensitas tinggi. Sinergi yang baik antarinstansi akan membantu menciptakan pelabuhan domestik yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Peran Sumber Daya Manusia dalam Efektivitas Pengawasan

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi pengawasan bongkar muat barang. Keterbatasan jumlah petugas menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh BKK Kelas I Tanjung Balai Karimun. Pada saat aktivitas bongkar muat meningkat, petugas harus membagi fokus antara pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pemantauan lingkungan secara bersamaan.

Selain jumlah petugas, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia juga memengaruhi kualitas pengawasan. Petugas dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi, karakteristik barang, serta potensi risiko kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan penting agar pengawasan dapat berjalan secara optimal.

Koordinasi Lintas Instansi dalam Pengawasan Bongkar Muat

Pengawasan bongkar muat barang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti otoritas pelabuhan, bea cukai, dan pengelola pelabuhan. Koordinasi lintas instansi menjadi faktor penentu dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan, namun masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Penguatan koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Koordinasi yang baik juga dapat mempercepat proses bongkar muat tanpa mengabaikan aspek kesehatan masyarakat, sehingga tujuan pengawasan dan kelancaran operasional pelabuhan dapat tercapai secara seimbang.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan

Pemanfaatan teknologi informasi berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan bongkar muat barang. Sistem pencatatan digital, pelaporan berbasis aplikasi, serta integrasi data antarinstansi dapat membantu petugas dalam melakukan pengawasan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Teknologi juga memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih transparan dan terintegrasi.

Dalam konteks BKK Kelas I Tanjung Balai Karimun, pemanfaatan teknologi masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat dilakukan secara real time. Penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan sumber daya manusia dengan mendukung sistem pengawasan berbasis data dan risiko.

Dampak Pengawasan terhadap Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Implementasi pengawasan bongkar muat barang memberikan kontribusi signifikan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui pengawasan yang efektif, potensi masuk dan keluarnya penyakit dapat diminimalkan, sehingga risiko gangguan kesehatan masyarakat dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan tujuan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yang optimal tidak hanya melindungi masyarakat di sekitar pelabuhan, tetapi juga masyarakat luas sebagai pengguna akhir barang. Dengan demikian, pengawasan bongkar muat barang memiliki dampak strategis dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat secara nasional.

Pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan domestik memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Melalui pengawasan yang dilakukan secara sistematis, potensi masuk dan keluarnya faktor risiko kesehatan, seperti agen penyakit, vektor, maupun kontaminan lingkungan, dapat dikendalikan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bongkar muat barang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga merupakan bentuk pencegahan primer dalam sistem kesehatan masyarakat.

Implementasi pengawasan yang efektif berkontribusi dalam memutus mata rantai penyebaran penyakit melalui jalur distribusi barang antarpulau. Barang yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dapat segera diidentifikasi dan dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan kekarantinaan kesehatan. Dengan demikian, risiko penyebaran penyakit ke wilayah tujuan distribusi dapat diminimalkan, sehingga masyarakat sebagai pengguna akhir barang memperoleh perlindungan yang lebih baik.

Selain berdampak langsung terhadap pencegahan penyakit, pengawasan bongkar muat barang juga memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kesadaran pelaku usaha dan pemangku kepentingan di pelabuhan. Pelaksanaan pengawasan yang konsisten mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek kebersihan, keamanan, dan kelayakan barang yang didistribusikan. Kesadaran ini pada akhirnya mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketentuan kekarantinaan kesehatan di lingkungan pelabuhan.

Dampak pengawasan juga dapat dilihat dari terciptanya lingkungan pelabuhan yang lebih sehat dan aman. Pemantauan sanitasi lingkungan yang dilakukan secara rutin membantu mengurangi potensi berkembangnya vektor penyakit di area pelabuhan. Lingkungan kerja yang sehat tidak hanya melindungi petugas dan pekerja pelabuhan, tetapi juga masyarakat sekitar pelabuhan yang berinteraksi langsung dengan aktivitas bongkar muat barang.

Dalam jangka panjang, pengawasan bongkar muat barang yang optimal berkontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pelabuhan yang sehat berperan sebagai gerbang perlindungan kesehatan nasional, terutama dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan bongkar muat barang tidak hanya memiliki dampak operasional, tetapi juga dampak strategis dalam menjaga stabilitas kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Pengawasan Bongkar Muat Barang

Berdasarkan hasil penelitian, strategi penguatan pengawasan bongkar muat barang dapat dilakukan melalui penambahan jumlah petugas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan fasilitas pendukung, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan kekarantinaan kesehatan.

Penguatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BKK dan mendukung terciptanya pelabuhan domestik yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Strategi penguatan pengawasan bongkar muat barang merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat di pelabuhan domestik. Penguatan pengawasan tidak hanya berfokus pada penambahan aktivitas pemeriksaan, tetapi juga pada perbaikan sistem, peningkatan kapasitas sumber daya, serta penguatan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam kegiatan pelabuhan. Dengan strategi yang tepat, pengawasan bongkar muat barang dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Ketersediaan petugas yang memadai sangat berpengaruh terhadap cakupan dan kualitas pengawasan, terutama pada saat aktivitas bongkar muat berlangsung dengan intensitas tinggi. Selain penambahan jumlah petugas, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas juga menjadi kebutuhan penting agar petugas mampu menghadapi kompleksitas pengawasan bongkar muat barang yang terus berkembang.

Strategi berikutnya adalah penyediaan dan peningkatan fasilitas serta sarana pendukung pengawasan. Ketersediaan peralatan pemeriksaan yang memadai, ruang kerja yang representatif, serta fasilitas pendukung lainnya akan membantu petugas dalam melaksanakan tugas secara lebih efektif. Fasilitas yang memadai juga mendukung penerapan standar operasional prosedur secara konsisten, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan kualitas yang terjaga.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi strategi penguatan yang sangat relevan dalam pengawasan bongkar muat barang. Penggunaan sistem pencatatan digital, pelaporan berbasis aplikasi, serta integrasi data antarinstansi dapat mempercepat proses pengawasan dan meningkatkan akurasi data. Teknologi informasi memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya manusia.

Selain itu, penguatan koordinasi lintas instansi perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang terpadu. Pengawasan bongkar muat barang melibatkan berbagai pihak, seperti Balai Karantina Kesehatan, otoritas pelabuhan, bea cukai, dan pengelola pelabuhan. Koordinasi yang baik antarinstansi akan menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pelayanan, serta memastikan bahwa aspek kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap aktivitas bongkar muat.

Strategi penguatan pengawasan juga perlu didukung dengan peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pengawasan kekarantinaan kesehatan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada pencegahan risiko kesehatan.

Secara keseluruhan, strategi penguatan pengawasan bongkar muat barang harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, teknologi informasi, koordinasi lintas instansi, serta pembinaan pelaku usaha merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan pengawasan bongkar muat barang di pelabuhan domestik dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pelabuhan yang sehat, aman, dan mendukung perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengawasan bongkar muat barang oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Tanjung Balai Karimun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip kekarantinaan kesehatan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui serangkaian tahapan, meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, pemeriksaan fisik terhadap barang-barang tertentu yang berisiko, serta pemantauan sanitasi lingkungan pelabuhan. Pelaksanaan pengawasan tersebut berperan penting dalam upaya pencegahan masuk dan keluarnya faktor risiko kesehatan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan bongkar muat barang belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas dan peralatan pendukung, serta tingginya intensitas aktivitas bongkar muat pada waktu tertentu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, koordinasi lintas instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi serta masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya pengawasan kekarantinaan kesehatan turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan pengawasan bongkar muat barang secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi lintas instansi dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Dengan penguatan pengawasan yang optimal, pelabuhan domestik diharapkan tidak hanya mampu mendukung kelancaran arus logistik, tetapi juga berfungsi sebagai lingkungan yang aman dan sehat, sehingga tujuan perlindungan kesehatan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan*, Jakarta, 2021.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan*, Jakarta, 2020.
4. World Health Organization, *International Health Regulations (2005)*, Third Edition, Geneva, 2016.
5. D. Suryani and R. Handayani, "Peran karantina kesehatan dalam pencegahan penyebaran penyakit melalui pelabuhan laut," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, vol. 14, no. 2, pp. 95–103, 2021.
6. M. Herianto and H. As, "Kualitas pelayanan pemeriksaan kesehatan kapal di pelabuhan laut," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 1, pp. 33–41, 2022.
7. S. Nurhariza, A. Putra, and Y. Lestari, "Analisis pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut di pelabuhan domestik," *Jurnal Transportasi Laut*, vol. 9, no. 1, pp. 21–29, 2023.
8. A. M. Priyatno and L. Ningsih, "Klasifikasi daging sapi dan daging babi menggunakan learning vector quantization," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, vol. 1, no. 2, pp. 10–18, 2022. <https://doi.org/10.31004/riggs.v1i2.98>
9. R. M. Rizki, "Pengaruh e-commerce pada penjualan makanan khas Kampar," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, vol. 2, no. 1, pp. 45–52, 2023. <https://doi.org/10.31004/riggs.v2i1.123>
10. R. M. Rizki, L. Saputra, and R. M. Sari, "Optimasi pelayanan e-commerce menggunakan chatbot," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, vol. 3, no. 1, pp. 60–68, 2024. <https://doi.org/10.31004/riggs.v3i1.210>
11. A. Wahyudi, "Manajemen risiko kesehatan lingkungan pelabuhan laut," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, vol. 16, no. 1, pp. 1–9, 2021.
12. L. Sari and B. Pratama, "Pengawasan logistik pelabuhan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat," *Jurnal Logistik Indonesia*, vol. 5, no. 2, pp. 77–85, 2022.
13. Y. Kurniawan, "Sistem pengawasan terpadu di pelabuhan domestik Indonesia," *Jurnal Transportasi*, vol. 18, no. 3, pp. 201–210, 2020.
14. P. Rahman and D. Lestari, "Sanitasi lingkungan pelabuhan dan risiko kesehatan masyarakat," *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan*, vol. 11, no. 2, pp. 55–63, 2021.
15. N. Hidayat, "Kebijakan kesehatan pelabuhan dalam perspektif nasional," *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 1, pp. 14–23, 2023.